

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023**

**1. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Secara ringkas, capaian kinerja makro Kota Pangkalpinang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel II.1  
Capaian Kinerja Makro Kota Pangkalpinang  
Tahun 2022-2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Laju kinerja (%)
		2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia	79,77	80,45	0,85
2	Angka Kemiskinan	4,55	4,27	-6,15
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,9	5,76	-2,37
4	Pertumbuhan Ekonomi	10.208,27	10.750,91	5,32
5	Pendapatan Perkapita (ribu rupiah)	77.075	82.736	7,35
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio)	0,268	0,277	3,36

Sumber data : BPS Kota Pangkalpinang, 2024

**2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :

**2.1. Urusan Pendidikan**

**2.1.1. Capaian Kinerja Outcome**

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian kinerja Tahun 2023
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{3.881}{8.576} \times 100\% = 45,25\%$	$\frac{7.184}{8.751} \times 100\% = 82,09\%$
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{23.820}{26.759} \times 100\% = 89,17\%$	$\frac{26.305}{27.109} \times 100\% = 97,03\%$
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{8.802}{12.524} \times 100\% = 70,28\%$	$\frac{12.282}{12.689} \times 100\% = 96,79\%$
4	Tingkat partisipasi warga Negara berusia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{8.802}{12.524} \times 100\% = 70,28$	$\frac{414}{414} \times 100\% = 100\%$

### 2.1.2. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebesar Rp. 213.772.386.198,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan Dasar dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- b. Program Pengembangan Kurikulum dengan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan kegiatan Penerbitan izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

### 2.1.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pendidikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Partisipasi penduduk usia PAUD di kota pangkalpinang ke dlm jenjang PAUD belum optimal di tahun 2023. Ini ditunjukkan dengan angka capaian SPM PAUD yang masih sebesar 87%;
- Kurangnya ketersediaan SDM pendidik pada jenjang pendidikan dasar krn mulai tahun 2025 tenaga pendidik hanya boleh direkrut melalui mekanisme perekrutan P3K;
- Kurangnya guru bersertifikat krna sertifikasi guru diperoleh melalui diklat PPG dengan dana tidak sedikit;

- Kurangnya ketersediaan pengawas sekolah karena pengawas sekolah hanya boleh direkrut dari pendidik yang sudah lulus guru penggerak sementara jumlah guru penggerak kita masih minim.

## 2.2. Urusan Kesehatan

### 2.2.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian kinerja Tahun 2023
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	$\frac{632}{231.062} \times 100\% = 2,74\%$	$\frac{583}{236.267} \times 100\% = 2,47\%$
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{5}{7} \times 100\% = 71,43\%$	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{4.061}{4.285} \times 100\% = 99,77\%$	$\frac{3.925}{4.103} \times 100\% = 95,66\%$
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{3.925}{4.086} \times 100\% = 96,06\%$	$\frac{3.862}{3.931} \times 100\% = 98,24\%$
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{3.866}{3.891} \times 100\% = 99,36\%$	$\frac{3.775}{3.775} \times 100\% = 100\%$
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{15.442}{16.881} \times 100\% = 91,48\%$	$\frac{16.434}{16.546} \times 100\% = 99,32\%$
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{36.722}{40.301} \times 100\% = 91,12\%$	$\frac{37.502}{37.995} \times 100\% = 98,70\%$
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{142.440}{144.528} \times 100\% = 98,56\%$	$\frac{147.793}{148.639} \times 100\% = 99,43\%$
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{13.681}{14.034} \times 100\% = 97,48\%$	$\frac{15.426}{15.932} \times 100\% = 96,82\%$
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{40.114}{42.098} \times 100\% = 95,29\%$	$\frac{43.390}{43.827} \times 100\% = 99,00\%$
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{5.306}{5.404} \times 100\% = 98,19\%$	$\frac{5.628}{5.628} \times 100\% = 100\%$
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{420}{420} \times 100\% = 100\%$	$\frac{420}{420} \times 100\% = 100\%$
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{610}{610} \times 100\% = 100\%$	$\frac{7.193}{7.193} \times 100\% = 100\%$

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian kinerja Tahun 2023
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{6.385}{6.385} \times 100\% = 100\%$	$\frac{7.073}{7.073} \times 100\% = 100\%$

### 2.2.2. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan kesehatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebesar Rp. 285.822.009.174,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

### 2.2.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan kesehatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Penentuan jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penerima layanan SPM masih menggunakan angka estimasi, sehingga terkadang jumlahnya lebih besar dari angka sesungguhnya yang menyebabkan capaian kinerja SPM kesehatan tidak mencapai angka 100 persen. Dan selain itu masyarakat Pangkalpinang yang sudah tidak berdomisili di Pangkalpinang tapi masih ber KTP Pangkalpinang juga menjadi salah satu komponen dalam penentuan target penerima layanan SPM, hal ini juga berdampak pada lebih tingginya target SPM dibandingkan dengan kondisi sebenarnya;
- Masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih melakukan persalinan pada fasilitas layanan kesehatan, sehingga tidak termasuk dalam cakupan pemenuhan SPM;
- Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan guna melakukan pemeriksaan rutin bila anaknya sudah berusia diatas 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan karena takut dengan hasilnya.

## 2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 2.3.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian kinerja Tahun 2023
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	0
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{41.485}{65.462} \times 100\% = 63,37\%$	$\frac{53.438}{53.824} \times 100\% = 99,28\%$
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{45.016}{65.462} \times 100\% = 68,77\%$	$\frac{51.628}{53.824} \times 100\% = 95,92\%$
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{3.844}{3.844} \times 100\% = 100\%$	$\frac{4.081}{4.081} \times 100\% = 99,28\%$

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian kinerja Tahun 2023
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{382.568}{403,137} \times 100\%$ = 94,90%	$\frac{53.438}{53.824} \times 100\%$ = 99,28%
8.a.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	$\frac{20}{40} \times 100\% = 50\%$
8.b.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{375}{375} \times 100\% = 100\%$	$\frac{317}{317} \times 100\% = 100\%$

### 2.3.2. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebesar Rp. 108.709.873.700,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kab/Kota;
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengembangan Permukiman dengan kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Program Penataan Bangunan Gedung dengan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- g. Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota;
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

### 2.3.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut :

- Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia, baik itu dalam tahun anggaran yang berkenaan maupun melewati tahun anggaran. Untuk keterlambatan yang terjadi pada tahun berkenaan, penyedia dikenakan denda keterlambatan. Dan untuk penyedia yang keterlambatannya melewati tahun anggaran, maka sisa pembayarannya baru dianggarkan di anggaran perubahan 2024.
- Dalam penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum, terdapat penurunan capaian kinerja karena belum dilaksanakannya tahapan penerapan SPM sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga belum data penerima layanan masih belum berdasarkan data empiris.

## 2.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

### 2.4.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman yang diperoleh oleh Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian kinerja Tahun 2023
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{56,87}{85,3} \times 100\% = 66,67\%$	$\frac{56,87}{85,3} \times 100\% = 66,67\%$
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{1.402}{39.858} \times 100\% = 3,52\%$	$\frac{1.387}{49.414} \times 100\% = 2,81\%$
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{11.795}{11.795} \times 100\% = 100\%$	$\frac{13.625}{13.625} \times 100\% = 100\%$

#### **2.4.2. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Realisasi belanja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebesar Rp. 12.143.424.730,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kegiatan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
- b. Program Wawasan Permukiman dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar;
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Kegiatan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum dengan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan; dan
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan Rumah Serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil.

#### **2.4.3. Permasalahan Yang Dihadapi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Belum adanya pemutakhiran data jumlah rumah di Kota Pangkalpinang, sehingga pelaksanaan kegiatan yang terkait perumahan menjadi terhambat
- Terdapat pengembang yang masih belum menyerahkan asetnya ke Pemerintah Kota Pangkalpinang, sehingga pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak dapat melaksanakan perawatan PSU nya.



## 2.5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

### 2.5.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat yang diperoleh oleh Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian kinerja Tahun 2023
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{27.658}{200.304} \times 100\% = 13.81\%$	$\frac{156.138}{156.964} \times 100\% = 99,47\%$
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{0}{24.826} \times 100\% = 0\%$	$\frac{320}{231.062} \times 100\% = 0,14\%$
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{0}{4.165} \times 100\% = 0\%$	$\frac{20.186}{20.186} \times 100\% = 100\%$
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{46}{46} \times 100\% = 100\%$	$\frac{300}{300} \times 100\% = 100\%$
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	12,49	13,69

### 2.5.2. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja urusan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebesar Rp. 27.832.590.177,- yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencna Daerah dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Pembinaan Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) Kabupaten/kota;
- b. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Korban dengan kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Inspeksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran;
- c. Program Penganggulangan Bencana dengan kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

### 2.5.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Sulitnya perolehan data masyarakat yang terdampak penegakan perda maupun yang terdampak bencana kebakaran. Sebagian masyarakat baru mau memberikan datanya bila akan menerima bantuan;
- Pada sebagian kejadian kebakaran, petugas mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi kejadian yang berada pada wilayah permukiman padat penduduk;
- Kualitas, dan kuantitas (secara struktural dan fungsional) SDM yang membidangi belum terpenuhi di dalam menjalankan sub urusan kebencanaan;
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan evakuasi korban;
- Belum maksimalnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan sub urusan kebencanaan;
- Belum adanya data yang valid mengenai jumlah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

## 2.6. Urusan Sosial

### 2.6.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian kinerja Tahun 2023
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{483}{831} \times 100\% = 58,12\%$	$\frac{652}{1.087} \times 100\% = 59,98\%$
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{582}{582} \times 100\% = 100\%$	$\frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$

### 2.6.2. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebesar Rp. 8.559.017.238,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- b. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti;
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Pengelolaan Data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

### **2.6.3. Permasalahan Yang Dihadapi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Kota Pangkalpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan urusan sosial masih belum maksimal;
- Adanya keterbatasan anggaran pendukung penerapan Standar pelayanan minimal.

## **3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

### **3.1. Hasil EPPD Tahun 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil memperoleh hasil EPPD dengan skor kinerja **2,8039** dan status kinerja **Sedang**.

### **3.2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022**

Berdasarkan Laporan Nomor : 83.A/LHP/XVIII.PPG/05/2023, Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil mendapatkan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2023 yang berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang menyajikan secara wajar dalam semua hal, dalam material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### 4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang (Unaudited) Tahun 2023, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 1.043.445.690.146,83 dan realisasi belanja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 mencapai Rp. 1.104.186.735.980,-

Secara rinci, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

##### 4.1. Pendapatan Daerah

Kode Rekening	Jenis pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.015.091.776.205,00</b>	<b>1.043.445.690.146,83</b>	<b>102,79</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>178.137.400.477,00</b>	<b>197.290.042.823,83</b>	<b>110,75</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	117.000.000.000,00	125.800.534.186,00	107,52
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.159.326.228,00	12.517.645.045,04	95,12
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.094.236.429,00	9.094.236.429,00	100,00
4.1.04.	Lain-lain PAD Yang Sah	38.883.837.820,00	49.877.627.163,79	128,27
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>831.954.375.728,00</b>	<b>839.890.378.048,00</b>	<b>100,95</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.253.732.359,00	729.386.884.061,00	101,55
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.700.643.369,00	110.521.493.987,00	97,20
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>6.265.269.275,00</b>	<b>125,31</b>
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000.000,00	6.265.269.275,00	125,31

Sumber data : Badan Keuangan Daerah (*unaudited*)

##### 4.2. Belanja Daerah

Kode Rekening	Jenis pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.173.443.135.482,00</b>	<b>1.104.186.735.980,00</b>	<b>94,10</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>910.805.554.088,00</b>	<b>859.253.818.803,00</b>	<b>94,34</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	437.414.594.180,00	417.814.615.590,00	95,52
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	419.170.829.358,00	388.047.485.616,00	92,58
5.1.05.	Belanja Hibah	51.664.163.550,00	50.909.877.597,00	98,54
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	2.555.967.000,00	2.481.840.000,00	97,10
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>261.625.036.755,00</b>	<b>244.773.895.650,00</b>	<b>93,56</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	14.103.917.000,00	10.466.000.000,00	74,21
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.961.677.799,00	89.585.018.639,00	95,34
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.117.911.449,00	70.748.855.806,00	99,48
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	53.628.733.003,00	45.595.502.179,00	85,02
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	28.812.797.504,00	28.378.519.026,00	98,49
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.012.544.639,00</b>	<b>159.021.527,00</b>	<b>15,71</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.012.544.639,00	159.021.527,00	15,71

Sumber data : Badan Keuangan Daerah (*unaudited*)

## 5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang memiliki inovasi daerah sebagai berikut.

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	<b>GERBANG SURGA PGK</b> (Gerakan Bangun Shubuh Warga Kota Pangkalpinang)	Kegiatan shalat subuh yang dilaksanakan setiap hari Minggu bergilir ke seluruh masjid yang ada di Kota Pangkalpinang dengan peserta Para Pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang dan mengajak serta juga Forkopimda Kota Pangkalpinang, Kementerian Agama dan Para pengurus organisasi Islam yang ada di Kota Pangkalpinang
2	Bappelitbangda	<b>TINTA INDAH PGK</b> (Sistem Informasi Peta Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang)	merupakan inovasi dalam rangka penyampaian laporan terhadap setiap inovasi yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang
3	BKPSDMD	<b>SIMENTILIN</b> (Strategi Implementasi Kompetensi Lingkup Kepegawaian)	Aplikasi yang digunakan untuk <i>profiling</i> data ASN di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang
4	BKPSDMD	<b>ASN PINTAR</b> (Aparatur Sipil Negara Pengenalan Informasi Tugas Belajar)	Aplikasi tentang informasi tugas belajar yang dapat langsung diakses di web tanpa harus datang langsung ke kantor BKPSDMD
5	BKDSDMD	<b>KILAT</b> (Kumpulan Informasi Diklat)	Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di BKPSDMD dengan menghadirkan berbagai inovasi di bidang pendidikan dan pelatihan
6	Badan Kesbangpol	<b>SI AMOR</b> (Sistem Aplikasi Melapor Organisasi Masyarakat)	Merupakan sebuah inovasi yang dihadirkan sebagai solusi atas tantangan kurangnya motivasi bagi pengurus Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk melaporkan keberadaan organisasi mereka ke Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
7	Dinas Pariwisata	<b>APPEKRAF</b> (Aplikasi Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif)	Inovasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data valid pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata Kota Pangkalpinang yang update dan valid.
8	DPMPTSP & Tenaga Kerja	<b>IKAN MAS</b> (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan perizinan oleh masyarakat yang memberikan masukan/respon terhadap pelayanan yang telah diberikan.
9	DPMPTSP & Tenaga Kerja	<b>SIGRATASI</b> (Sistem Informasi Geografis Peluang Investasi)	Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi tentang potensi investasi di Kota Pangkalpinang yang dapat diakses melalui web resmi DPMPTSP & tenaga Kerja
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	<b>SENYUM BU PERI PGK</b> (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur dalam Membangun Budaya Perikanan Pangkalpinang)	Tujuan dari inovasi ini untuk meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			budidaya perikanan di Kota Pangkalpinang
11	Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman	<b>SIRUBEN</b> (Sigap Rumah Bencana)	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
12	Dinas Pangan dan Pertanian	<b>Gerakan Rabu Tanpa BT, Rabu dengan SENYUMAN</b> (Gerakan Masyarakat Rabu Tanpa Beras dan Terigu, Rabu dengan Seporsi Ikan Sayuran Buah Umbi Kacang-Kacangan)	Inovasi ini dimaksudkan untuk percepatan peningkatan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
13	Dinas Pangan dan Pertanian	<b>MILA KEPANG SATU</b> (Mini Laboratorium Portabel Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan)	Inovasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian bahan pangan sehat di Kota Pangkalpinang, dimana sampel yang diambil di lokus operasi dapat langsung diuji di mini laboratorium portabel di tempat.
14	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	<b>SIMONIK</b> (Sistem Informasi Online Industri Kota)	Inovasi ini bertujuan untuk dapat mengetahui data-data terkait perindustrian yang ada di Kota Pangkalpinang secara realtime, mudah dan cepat
15	Dinas Perhubungan	<b>SENDAL PINK PGK</b> (Sistem Elektronifikasi Pengendalian Perparkiran Kota Pangkalpinang)	Inovasi ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan tata kelola perparkiran, mendapatkan data base juru parkir dan titik parkir guna meningkatkan PAD
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>PeDeKaTe BERKAH</b> (Pengantin Dapat Kartu Keluarga, KTP-el dan Akta Perkawinan/Buku Nikah)	Inovasi ini bertujuan memeberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan bagi pasangan yang baru menikah yang meliputi KK, KTP dan Akta Perkawinan.
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>SIMASDAR</b> (Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air)	Inovasi ini memberikan informasi mengenai peta jaringan saluran primer dan sekunder di Kota Pangkalpinang, menjadi jembatan antara bidang sumber daya air Dinas PUPR Kota Pangkalpinang dan masyarakat atas informasi yang berhak diketahui masyarakat dalam rangka transparansi kegiatan dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Pangkalpinang
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>SIJANTAN BERTARUNG AKSI</b> (Inovasi Membangun Jembatan Jerambah Gantung untuk Membuka Akses Investasi)	Inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat di bidang infrastruktur, mengingat sejarah dimana Jerambah Gantung ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Pangkalpinang dan diharapkan dengan dibangunnya jembatan ini dapat terbentuk pusat ekonomi baru di Kota Pangkalpinang
19	Dinas Komunikasi & Informatika	<b>SIMDARATEL</b> (Sistem Informasi Pendataan Menara Telekomunikasi)	Aplikasi Simdaratel merupakan aplikasi layanan publik yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait menara telekomunikasi dan untuk mengajukan permohonan dari perusahaan untuk mendirikan menara telekomunikasi.

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
20	Dinas Komunikasi & Informatika	<b>SIPELANGI</b> (Sistem Informasi Pelayanan langsung Ditangani)	Inovasi ini bertujuan mewujudkan pelayanan dan informasi publik yang berkualitas dan terpercaya di pemerintahan kota pangkalpinang, mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan pelayanan publik berbasis elektronik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel
21	Dinas Komunikasi & Informatika	<b>SENYUM</b> (Semue Bise Nyari Informasi Umum)	Inovasi ini memedudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai seputar Pangkalpinang dengan menggunakan keyword yang telah ditentukan.
22	Dinas Lingkungan Hidup	<b>BANK SAMPAH PAPIN</b> (Bank Sampah Pangkalpinang)	Inovasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mengenal lebih jauh mengenai bank sampah PAPIN sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengatasi masalah persampahan
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<b>SINOPSIS</b> (Sarana Informasi Online Perpustakaan Secara Sistematis)	Inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan lebih mencintai buku
24	Kecamatan Bukit Intan	<b>KEBAJIK BUKIT INTAN</b> (Kerja Bakti Jajaran Instansi Kecamatan Bukit Intan)	Inovasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan dan gotong royong
25	Kecamatan Gabek	<b>BALSEM</b> (Bantuan Langsung Sembako)	Inovasi ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, membantu pengentasan kemiskinan, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
26	Kecamatan Gabek	<b>GEBER SAJA</b> (Gerakan Bersih Saluran Jalan)	Inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan
27	Kecamatan Gerunggang	<b>BERBAGI</b> (Bergerak Bersama Pegawai Gerunggang Peduli)	Inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan kepedulian pada masyarakat kurang mampu, mempererat tali silaturahmi dan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu
28	Puskesmas Girimaya	<b>PAKU BUMI</b> (Pemantauan Kesehatan dan Edukasi Ibu Hamil)	Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil terhadap masalah seputar kehamilan dan faktor resikonya
29	Puskesmas Pangkalbalam	<b>PELITA STUNTING</b> (Peduli Ibu Bayi dan BALITA Atasi Stunting)	Inovasi ini dimaksudkan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lingkup Kecamatan Pangkalbalam

Pj. Wali Kota Pangkalpinang



LUSJE ANNEKE TABALUJAN